

ALOKASI PRODUKSI OKSIGEN UNTUK KEBUTUHAN MEDIS

Petugas menyiapkan tabung oksigen untuk diisi di Cibinong Gas Oxygen Filling Station, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan produsen oksigen telah mengalokasikan 100 persen produksinya untuk kebutuhan medis. Hal ini sesuai dengan instruksi Kementerian Perindustrian nomor 1 tahun 2021 yang mewajibkan setiap industri manufaktur membantu penanganan Covid-19 di sektor kesehatan.



IDN/ANTARA

Airlangga: Manfaatkan Momentum Pertumbuhan Ekonomi dengan Akselerasi Investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini juga termasuk dengan memberikan insentif terhadap bidang usaha prioritas dengan kriteria tertentu.

JAKARTA (IM) - Berbagai upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan dapat tercapai jika diiringi dengan kerja sama yang baik dengan seluruh pihak, termasuk dukungan dari para investor dan seluruh pelaku ekonomi.

Dari segi pemulihan ekonomi nasional, saat ini momentum pemulihan ekonomi telah dapat dirasakan dengan membaiknya ekonomi Indonesia pada Q1-2021 dengan hanya berkontraksi sebesar

0,74% (yoy).

Momentum ini harus dijaga salah satunya melalui akselerasi investasi agar ekonomi dapat pulih lebih cepat meskipun saat ini terdapat tantangan akibat eskalasi kasus Covid-19, khususnya varian delta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Investor Daily Summit 2021, Selasa (13/7) menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini juga termasuk dengan memberikan insentif terhadap bidang usaha prioritas dengan kriteria tertentu.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi produktif yang menciptakan usaha-usaha baru sehingga akan membuka banyak lapangan kerja dan masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan yang ada.

"Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama mengakselerasi momentum pertumbuhan dengan mendorong investasi dan juga terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian pandemi sehingga kita mampu mewujudkan pemulihan ekonomi nasional secara lebih cepat," kata Airlangga, seperti dilansir dari laman Kemenko Perekonomian, Rabu (14/7).

Permintaan domestik saat ini telah kembali dan direpon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Juni 2021 tetap pada level ekspansi (53,5).

Bahkan, aktivitas manufaktur Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Myanmar, Thailand dan Malaysia. Dengan peningkatan aktivitas produksi tersebut, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga berangsur teratasi.

Sementara itu dari sisi eksternal, Indonesia terbantu dengan surplus neraca perdagangan selama 13 bulan ber-

turut-turut yang ditopang oleh peningkatan harga-harga komoditas global. Airlangga menegaskan hal ini akan memberikan sentimen positif bagi aktivitas ekspor-impor Indonesia ke depan.

Di saat yang sama, arus modal asing kembali masuk dan terjaganya level defisit transaksi berjalan akan memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan sektor eksternal Indonesia.

"Dengan berbagai kebijakan ekonomi, terutama insentif perpajakan, termasuk relaksasi PPN, Pemerintah melihat bahwa recovery masih dapat terus berlangsung dan diharapkan masih bisa tumbuh di angka pertumbuhan 7% di kuartal II 2021,"

21 UMKM Indonesia Tembus Pameran Terbesar se-Asia di Jepang

JAKARTA (IM) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengemukkan kinerja ekspornya. Sebanyak 35 perusahaan Indonesia, 21 di antaranya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diboyong ke Jepang untuk mengikuti pameran terbesar se-Asia yaitu The 13th Hoteser Japan & The Foodex in Kansai di Jepang. Pameran berlangsung pada 14-16 Juli 2021 di Intex Osaka, Kansai.

Pameran ini juga diikuti sejumlah negara seperti Kanada, Prancis, Spanyol, Jepang, serta 106 importir produk mamin dari negara-negara di kawasan Asia.

"Partisipasi Indonesia terutama UMKM di The Foodex in Kansai 2021 menunjukkan eksistensi produk mamin Indonesia yang berkualitas tinggi dan berorientasi ekspor sehingga mampu bersaing dan memanfaatkan peluang pasar di Negeri Sakura, khususnya di tengah pandemi Covid19," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumed, seperti dilansir dari laman Kemendag, Rabu (14/7).

Menurut Didi, di tengah pandemi seperti sekarang, keikutsertaan UMKM ekspor sangat membanggakan. Produk-produk UMKM berhasil mendapatkan berbagai persyaratan buyer sehingga memudahkan produk UMKM menembus pasar global di negara lainnya.

Pameran The Foodex in Kansai 2021, lanjut Didi, merupakan

ajang diversifikasi produk mamin Indonesia ke wilayah Barat Jepang. Setelah absen pada 2020 lalu, kini pada tahun 2021 untuk kedua kalinya Indonesia dapat menasar wilayah barat Jepang sekaligus menghadirkan produk mamin potensial.

"Diharapkan keikutsertaan di ajang The Foodex in Kansai 2021 ini dapat menjadikan produk mamin Indonesia semakin dikenal di Asia, khususnya pasar Jepang dan mancanegara," kata Didi.

Perusahaan Indonesia mempromosikan produk-produknya di Paviliun Indonesia yang berkonsep Etalase Makanan Minuman Kemas Indonesia.

Produk-produk Indonesia yang ditampilkan yaitu keripik tempe, keripik nangka, keripik ikan, produk madu, produk kopi, mi godog instan, mi goreng instan, teh tank, tepung moeaf (singkong), ikan asin, crispy salad, kacang mete, permen kopi, wafer/biscuit, selai coklat, minuman herbal, minuman sari kelapa, bumbu instan, jeli/nata de coco, kari ayam kemasan dan tempe.

Konjen RI untuk Osaka Diana E.S. Sutikno menjelaskan seluruh eksportir yang berpartisipasi telah memenuhi persyaratan dari buyer Jepang yaitu memiliki produk-produk yang sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jepang menerapkan standar yang sangat ketat dalam hal ke-

amanan pangan (food safety). Bila perusahaan Indonesia berhasil menembus pasar Jepang, peluang ekspor ke negara lain juga akan terbuka lebar," jelasnya.

Berdasarkan data ITC Trademap, nilai ekspor produk makanan olahan asal Indonesia ke Jepang pada 2020 sebesar USD643.77 juta atau naik 15,14 persen pada periode yang sama tahun 2019.

Ekspor produk makanan olahan Indonesia ke Jepang berada di urutan ke-10 dan masih sangat berpotensi untuk terus ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke Jepang selama lima tahun terakhir (2016-2020) yang tumbuh 8,72 persen.

Produk utama makanan olahan ke Jepang di antaranya olahan udang, olahan ikan, olahan kepiting, biskuit, dan olahan buah-buahan.

Pameran ini diselenggarakan atas sinergi antara Perwakilan Kementerian Perdagangan di Jepang (Atase Perdagangan RI di Tokyo dan ITPC Osaka), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka, BPOM, serta Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Keikutsertaan di pameran ini merupakan kegiatan lanjutan Maret 2021 lalu di Makuharrie Messe Chiba, Jepang. **pan**

IDN/ANTARA



HARGA CABAI RAWIT NAIK
Pedagang menyortir cabai rawit di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (14/7). Menurut pedagang harga cabai rawit naik sejak dua hari lalu dari Rp48 ribu menjadi Rp74 ribu perkilogram akibat berkurangnya pasokan.

Upaya Pemerintah Jadikan Indonesia Pemain Utama Industri Kendaraan Listrik

JAKARTA (IM) - Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik di tanah air. Sederet upaya dilakukan, antara lain melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia.

Industri alat transportasi menjadi prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. "Indonesia telah menetapkan roadmap atau peta jalan pengembangan EV melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV, dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (14/7).

Sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam industri EV, pemerintah menciptakan ekosistem EV dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari produsen, produsen baterai, pilot project, konsumen, dan infrastruktur seperti charging station, dan pilot project. Pemerintah telah menetapkan roadmap pengembangan EV hingga 2030. Targetnya, produksi EV pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.

"Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua," ucap Agus.

Dalam roadmap tersebut, diperkirakan pembelian kendaraan listrik untuk roda empat akan

mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk kendaraan listrik roda dua akan mencapai 398.530 unit.

Guna mempercepat popularisasi penggunaan EV, pemerintah akan menetapkan peraturan tentang roadmap pembelian EV di instansi pemerintahan. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPNBM sebesar 0% melalui Peraturan Pemerintah No 74/2021, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 0% untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 3/2020.

Kemudian BBN-KB sebesar 10% Mobil Listrik dan 2,5% Sepeda Motor Listrik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 9/2019, uang muka minimum sebesar 0% dan suku bunga rendah untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020, diskon penyambungan dan penambahan daya listrik, dan lainnya.

"Produsen EV juga dapat berbagai keuntungan seperti Tax Holiday, Mini Tax Holiday melalui Undang-undang 25/2007, Peraturan Menteri Keuangan (PMK 130/2020), Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 7/2020, tax allowance (PP 18/2015 Jo PP 9/2016, Permenperin 1/2018), Pembebasan Bea Masuk (PMK 188/2015), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan Super Tax Deduction untuk kegiatan R&D (PP 45/2019, dan PMK No.153/2020)," kata Agus. **dro**

Reformasi Perpajakan Kunci Memperbaiki Penerimaan Negara

JAKARTA (IM) - Reformasi perpajakan adalah kunci untuk memperbaiki penerimaan negara. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Pajak yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (14/7).

Dalam perjalanannya, perpajakan Indonesia telah melakukan reformasi sejak tahun 1983. Hasil reformasi saat ini yaitu mengubah sistem pemungutan pajak yang berdasarkan official assessment menjadi self assessment.

Kini, pemerintah bersama DPR membahas upaya reformasi perpajakan tahap selanjutnya untuk mendukung adanya tren perubahan global. Sebagai bangsa yang hidup berdampingan dengan bangsa yang lain dan memiliki hubungan ekonomi

global, Indonesia dihadapkan pada kompetisi namun juga berkolaborasi. "Sistem perpajakan kita harus terus kita desain dan redesain. Terus diperkuat di dalam konteks perubahan global dan perubahan di dalam negeri," kata Sri Mulyani.

Perubahan-perubahan global seperti teknologi digital yang semakin mendominasi dan perubahan iklim harus direpson secara tepat. Di dalam negeri, adanya teknologi digital juga mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Sehingga, sistem perpajakan harus diperkuat.

"Karena memang dunia terus berubah. Dunia terus mengalami perubahan yang menciptakan kesempatan, namun juga bisa mengancam Indonesia apabila kita tidak berubah," ujarnya. **hen**

Transaksi Digital Selama PPKM Darurat Rp727 M

JAKARTA (IM) - Transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh signifikan selama PPKM Darurat. Dalam sepekan nominal transaksi menggunakan QRIS naik 32,5%.

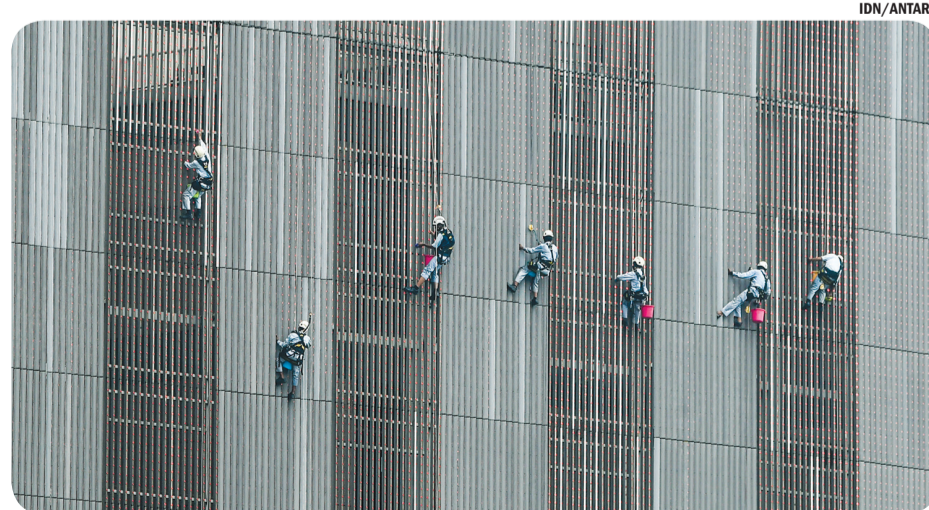
"Dari nominal transaksi itu kemarin Rp727,2 miliar, itu meningkat sekitar 32,5% dalam satu minggu, kebetulan pas periode PPKM ya," kata Kepala Grup Departemen Surveilans Bank Indonesia (BI) Budiattama dalam diskusi virtual, Rabu (14/7).

Dijelaskannya, jumlah transaksi menggunakan QRIS tercatat mencapai 8.037.518 kali atau 7,63% dalam satu minggu. Menurutnya masyarakat semakin tertarik menggunakan layanan transaksi digital ketimbang bank. "Saya kira ini menunjukkan bahwa ini motivasi transaksi ini, jalur-jalur transaksi ini memang semakin banyak melalui digital, daripada orang ke bank," tambahnya.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menambahkan jumlah merchant yang menyediakan layanan pembayaran QRIS sudah menyentuh 7,7 juta.

"Saat ini terakhir sudah mencapai 7,7 juta merchant. Ke depan kita mengatakan QRIS ini game changer dan untung kita punya QRIS karena dengan QRIS ini kita bisa tetap melakukan transaksi meskipun tanpa tatap muka," paparnya.

Ia mengatakan, BI akan meningkatkan fitur-fitur yang di QRIS untuk meningkatkan transaksi secara digital. "Ke depan ini juga kita akan tambah fitur-fiturnya ini menjadi di TTS. TTS itu tarik, transfer dan setor. Nanti ke depan ini memudahkan bisa membantu, lebih membantu lagi di era PPKM ini. Jadi artinya transaksi tidak terhenti, transaksi ekonomi, tetapi itu tetap bisa berjalan dengan dukungan QRIS," ujarnya. **hen**



IDN/ANTARA

PERKETAT PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Pekerja dengan perlengkapan keselamatan kerja membersihkan dinding gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (14/7). Pemerintah melalui Kemenaker terus meminta perusahaan memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) sebagai upaya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di tempat kerja.